

POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

THE POTENTIAL OF SOCIAL CONFLICT IN CAPITAL RELOCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, Anang Puji Utama

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(dj_hana@ymail.com, gedesu16@yahoo.co.id, anangpu19@gmail.com)

ABSTRAK

Sebagai salah satu alat penting dalam pemerintahan suatu negara, lokasi ibukota suatu negara menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan baik. Ibukota suatu negara akan menjadi tolak ukur dan cerminan di mata dunia internasional dalam memandang prospek, maupun nilai dari negara tersebut. Untuk itu, negara akan menjaga kondisi ibukota mereka dengan meminimalisasi maupun mengontrol permasalahan yang ada. Jika permasalahan - permasalahan sudah tidak bisa dikelola lagi, pemindahan (relocation) dapat menjadi pilihan. Kasus serupa telah terjadi di sejumlah negara seperti Nigeria, Brazil, Kazakhtan, Malaysia, dan negara lainnya. Indonesia pada tahun 2019 lalu sudah mencanangkan pemindahan Ibukota. DKI Jakarta ke Kalimantan yang menimbulkan beragam reaksi. Menimbang kondisi Indonesia yang merupakan negara multikultural dan rawan konflik sosial, pemindahan ibukota ini menjadi salah satu agenda yang memerlukan kajian mendalam, khususnya bidang sosial. Pada tulisan ini, penulis bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial mengenai pemindahan Ibukota Indonesia dan upaya pencegahannya dalam bingkai pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif-analisis, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari pemerintahan Kalimantan dan Akademika terkait. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi lebih lanjut, peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya adalah; konsep keamanan nasional, konsep perubahan sosial, teori konflik sosial, dan teori kebutuhan manusia. Penelitian ini kemudian membuktikan bahwa terdapat potensi konflik sosial dalam agenda pemindahan ibukota yang disebabkan perubahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya potensi ini dapat dicegah dengan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, tahapan pemindahan yang matang, serta program lainnya yang menjaga kestabilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Potensi Konflik, Konflik Sosial, Perubahan Sosial, Pemindahan Ibukota, Keamanan Nasional.

ABSTRACT

As one of the important instruments in the state government, location of the capital is something that must be considered properly. The capital will become a benchmark and a reflection to international community's eyes, in measuring the prospects and values of the nation itself. Therefore, the state will maintain the condition of their capital by minimizing and controlling the existing problems. If this problem can no longer be managed, relocating their capital can be an option. Similar cases have occurred in several countries such as Nigeria, Brazil, Kazakhstan, Malaysia, and some other countries. In 2019, Indonesia has announced the capital relocation of DKI Jakarta to Kalimantan, which has caused various reactions. Considering that Indonesia is a multicultural country, where it is prone to social conflicts, capital relocation is an agenda that requires in-depth study, especially in social sector. This thesis aims to analyze the potential of social conflicts regarding Indonesian capital relocation and its preventions within the framework of national defense and security of State Republic of Indonesia. The research was conducted using descriptive-analysis qualitative method, and data collection by interviewed a Kalimantan Government and related academics. To further explain the phenomenons that transpire, researcher applied several theories, i.e. National Security and Social Change Concept, Social Conflict Theory, and Human Need Theory. The research subsequently verified the existing social conflict's potential in Indonesia capital relocation, which caused by a change and human needs fulfillment. Hereinafter, this potention can be prevented by conforming human need according to priority, relocating in appropriate stages, and other programs that preserve a social equilibrium.

Keywords: Potential Conflict, Social Conflict, Social Change, Capital Relocation, National Security.

PENDAHULUAN

Ibukota sebuah negara adalah sebuah objek vital yang menjadi pusat pemerintahan sebuah Negara. Hal ini dikarenakan fungsi dari ibukota adalah sebagai kota / munisipalitas tempat kedudukan pusat unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sebagai pusat pemerintahan, ibukota juga menjadi daerah dimana hubungan diplomatic antar negara dilangsungkan, sebagai contoh, berbagai kantor kedutaan luar negeri berada dalam ruang lingkup ibukota. Maka dari itulah, Ibukota negara biasanya menjadi sebuah tolak ukur utama bagi negara lain dalam memandang prospek serta nilai dari sebuah negara tersebut. Tetapi, terdapat pula beberapa negara yang membagi ibukota negara mereka sesuai fungsi yang diinginkan, contohnya adalah pada Negara Republik Afrika Selatan yang memiliki 3 ibukota dengan masing masing fungsi yaitu; Pretoria sebagai pusat fungsi eksekutif (pemerintahan), Bloemfontein sebagai pusat fungsi yudisial (kehakiman), dan Cape Town sebagai pusat fungsi legislative. Tidak hanya Afrika Selatan, Israel (Yerusalem dan Tel Aviv) dan Belanda (Amsterdam dan Den Haag) juga memiliki penataan fungsi ibukota yang tidak seperti umumnya yaitu membagi kota administrasi maupun kota hubungan diplomatic yang terpisah.

Peran Ibukota sebagai tolak ukur internasional menjadikan berbagai negara tidak segan dalam menjadikan ibukota negara mereka sebaik mungkin (Potter, 2017). Perhatian khusus dan dana yang memadai digelontorkan untuk mengontrol permasalahan yang ada di dalam ibukota, maupun menata kota tersebut semenarik mungkin. Jika ibukota memiliki berbagai permasalahan yang sudah tidak bisa dikontrol, bukan tidak mungkin apabila dilakukannya

relokasi ibukota untuk mencari lokasi yang lebih baik lagi. Tentunya hal ini hanya akan dilakukan setelah pemikiran matang dan kajian yang mendalam untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Selain dari pihak pemangku kebijakan, isu pemindahan ibukota akan selalu hangat dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Isu ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena pemindahan ibukota negara mengharuskan berbagai instrument pemerintahan pusat untuk dipindahkan ke lokasi baru, baik Sumber Daya Manusia maupun Infrastrukturnya. Sehingga, seperti butterfly effect, dampak pemindahan ibukota akan dirasakan berbagai pihak dengan tingkatan yang berbeda – beda sesuai kedekatan dari objek isu.

Berbicara tentang pemindahan ibukota, banyak sekali negara yang telah melakukan agenda ini sejak dahulu, baik dikarenakan perang / kedudukan negara lain, maupun dikarenakan isu perpolitikan. Indonesia sebenarnya juga pernah melakukan agenda ini pada tahun 1945 – 1950, dimana Jakarta berpindah ke Yogyakarta lalu ke Bukittinggi sebelum kembali ke Jakarta hingga saat ini. Pemindahan ini tentunya dikarenakan isu kedudukan negara lain sehingga dilakukan secara terdesak, tetapi wacana pemindahan ibukota Indonesia secara formal telah dipikirkan semenjak era pemerintahan Presiden Soekarno (1957). Pada tahun tersebut, calon Ibukota Negara (IKN) yang dipilih adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan alasan berada di tengah lokasi Indonesia. Lalu pada tahun 1997, Presiden Soeharto juga mencanangkan pemindahan ibukota ke Jongol, Jawa Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 juga pernah membuat tim pemindahan ibukota yang belum ter-realisasikan.

Agenda yang terhenti ini selanjutnya kembali berjalan setelah Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengeluarkan pengumuman Pemindahan Ibukota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pengumuman ini merupakan hasil dari rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, yang juga telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana ini ditargetkan mulai pada 2020 sampai 2024 secara bertahap, dimana saat ini RUU yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibukota telah masuk tahap legalisasi nasional yang menjadi pembahasan prioritas Dewan Perwakilan Rakyat.

Penentuan lokasi pemindahan ibukota tentunya dengan mempertimbangkan berbagai syarat ibukota negara ideal diantaranya; aspek ketersediaan lahan yang memadai; sisi pertahanan dan keamanan yang baik; lingkungan sehat dan bebas dari bencana; kemudahan aksesibilitas dunia internasional dan arus informasi memadai; ketersediaan sumber daya alam dan manusia, kelayakan infrastruktur, serta kondisi masyarakat yang kondusif dan minim konflik. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternatif lokasi sebagai calon ibukota negara.

Rencana pemindahan ibukota ini juga direncanakan dengan perpindahan pegawai pemerintahan (Aparatur Sipil Negara) inti yang juga nantinya dilaksanakan secara bertahap setelah infrastruktur yang akan dibangun di calon IKN telah rampung dan siap digunakan. Perpindahan ini tentunya akan meningkatkan laju migrasi dan akan mempertemukan budaya pendatang dengan budaya masyarakat setempat. Menimbang perbedaan budaya dan

beragamnya nilai masyarakat Indonesia, hal ini tidak luput akan kerentanan terjadinya gesekan diantara budaya tersebut. Tidak hanya dari sisi perbedaan budaya saja, permasalahan lain yang muncul sangat tinggi potensinya untuk berubah menjadi suatu konflik di masyarakat terutama konflik sosial.

Fakta lain dibuktikan dengan berbagai fenomena yang terjadi diakibatkan terjadinya pengelompokan masyarakat yang akan menjadi penduduk asli dan pendatang. Pengelompokan ini rentan sekali mengekskalasi menjadi konflik sosial yang akan pecah jika terjadi kesenjangan didalamnya (Alo, 2015). Untuk melihat potensi ini, diperlukan berbagai studi kelayakan dan penelitian mendalam yang khusus mengawali pemindahan ibukota ini dengan tolak ukur kepuasan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar dari semua pihak yang akan merasakan langsung pemindahan ibukota ini.

Urgensi penelitian ini adalah sebagai salah satu sarana rujukan untuk mencegah potensi konflik sosial yang akan timbul, serta agar konflik tidak mengekskalasi dan mengganggu keamanan nasional dan ketertiban masyarakat saat terjadinya pemindahan ibukota ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu rekomendasi, bagi pemerintah dan semua pembuat kebijakan, dalam meminimalisir konflik sosial pemindahan Ibukota maupun sebagai sistem peringatan dini.

Melihat perhatian pemerintah maupun masyarakat Indonesia terhadap isu pemindahan ibukota yang cukup besar, tidak bisa kita pungkiri bahwa rencana ini sudah matang. Namun, ada baiknya kita juga melihat potensi – potensi konflik yang akan timbul dan dapat mengganggu kelancaran agenda ini. Selain itu, patut pula menjadi

pertanyaan apakah rencana pemindahan ibukota yang dilakukan sudah siap dan selaras dengan unsur pencegahan konflik sosial. Penelitian ini akan mengangkat Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia sebagai judul penelitian yang akan dikerjakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model Deskriptif-Analisis. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang menguraikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan cara pengumpulan data dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013).

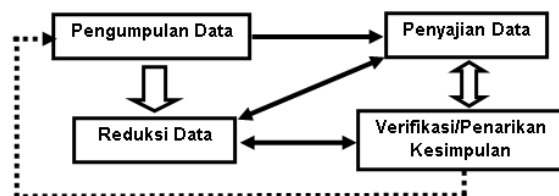
(Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B., 2008, p. 291) menjelaskan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif-analisis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sugiyono (Sugiyono, 2013) menjelaskan lebih lanjut mengenai metode deskriptif-analisis kualitatif sebagai suatu metode yang mempunyai fungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

sebagaimana adanya dan membuat deduksi yang berlaku secara umum.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara dengan informan kunci yakni Brigjen Pol Drs Eddy Sumitro T., M.SiH.(Wakapolda Kaltim), Hamdan (Kepala Bagian Perbatasan dan Penataan Wilayah), Imanudin (Kepala Bagian Pemerintahan), Hasada (Kepala Bidang Penanganan Konflik), Sidik, S.E, M.Si (Kesbangpol Kasubbag Perencanaan Program) dan triangulasi data dengan *opini expert* oleh Dr. Aditya Irawan, M. Si (Universitas Mulawarman)

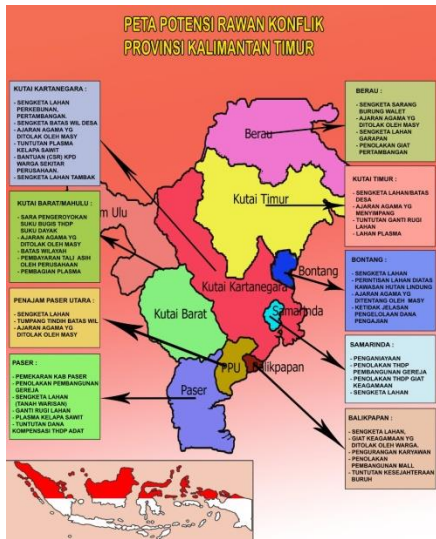
Hasil data di lapangan kemudian didukung oleh data sekunder berupa penelusuran kepustakaan terkait potensi konflik sosial dan pemindahan ibukota. Data analisis menggunakan Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification). Gambar 1.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman

Sumber: Miles, 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Potensi Konflik Sosial



Gambar 2. Pemetaan Konflik Kaltim
 Sumber: Kesbangpol Kaltim, 2019.

Pemindahan IKN merupakan satu bentuk perubahan yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi beban Ibu Kota Indonesia saat ini. kondisi yang sangat berat telah menjadi bagian dari Jakarta dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai hal. Kemacetan, kepadatan penduduk ekstrim, dan permasalahan lingkungan telah menjelma sebagai bagian dari rutinitas Ibukota Negara dalam beberapa tahun terakhir. permasalahan yang semakin banyak dan menumpuk telah membuat IKN seperti kehilangan martabatnya. Sudah tidak terhitung banyak pemberitaan dan kritik yang kemudian berakhir menjatuhkan wibawa DKI Jakarta sebagai wajah Indonesia.

Wacana pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibukota (Hartati, 2019).

Ada tujuan yang harus diperhatikan dalam keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki

relevansi dengan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural.
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan
5. Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan 5 komponen tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu acuan dalam wacana pemindahan ibukota NKRI dalam konteks kebijakan pemerintah daerah karena situasi yang tercipta adalah situasi yang harus kondusif bagi masyarakat. Perspektif kebijakan pemerintah daerah dirasa perlu dalam menelaah wacana kepindahan ibukota NKRI ini terutama untuk wilayah Kalimantan Timur karena hal ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur yang tentu saja diharapkan wacana kepindahan ibukota ini membawa dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan secara

merata dan bagi daerah lainnya di Indonesia karena posisinya yang berada ditengah NKRI.

Berbicara tentang konflik, Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kejadian terendah pada tahun 2017. Akan tetapi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, provinsi Kalimantan Timur mengalami konflik massal tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Jenis masalahnya meliputi keributan antar kelompok warga, pelajar, antar suku, warga dengan aparat pemerintah maupun dengan aparat keamanan.

Daerah penajam yang disebutkan sebagai lokasi calon ibukota tidak lepas dari konflik yang juga sering terjadi. Berdasarkan keterangan dari pihak Polda Kalimantan Timur, konflik yang sering terjadi adalah dikarenakan perkelahian antar suku yang kemudian mengeskalasi menjadi konflik sosial dengan pembentukan kelompok – kelompok dalam masyarakat. Tetapi, konflik ini sering kali terbukti sebagai suatu kasus pidana yang sebenarnya hanya luarnya saja yang dibingkai sebagai konflik sosial. Hal ini kembali diperjelas oleh Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Drs. Eddy Sumitro, yang memberikan contoh kasus konflik Penajam-Paser dimana bermula dengan penggunaan Miras oleh salah satu individu yang membawa senjata tradisional dan dalam pengaruh miras tersebut, ia membunuh salah satu warga lainnya. Setelah itu, konflik ini membawa – bawa nama adat tertentu, terprovokasi hoax dari pihak tidak bertanggung jawab, padahal pelaku juga merupakan masyarakat lokal juga.

Merujuk pada contoh konflik tersebut, maka dapat diambil data mengenai adanya potensi konflik yang disebabkan oleh adanya pengelompokan masyarakat lokal dan pendatang. Potensi

ini semakin memperkuat asumsi bahwa dengan adanya pemindahan ibukota yang akan melibatkan perpindahan penduduk dan mendorong laju migrasi, terdapat potensi konflik sosial di masyarakat.

Potensi Konflik: Exodus Perpindahan

Adanya eksodus juga akan menumbuhkan ketimpangan sosial dan ekonomi apabila tidak segera ditanggulangi sejak dalam perencanaan. Ketimpangan dapat terjadi karena gelombang eksodus merupakan kelompok masyarakat yang telah memiliki standar hidup di Jakarta. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2018) juga menunjukkan secara jelas bahwa ketimpangan saat ini terjadi dan mengangga di Kalimantan Timur.

Ketimpangan yang masih belum teratasi dan ancaman adanya perpindahan penduduk dari Jawa menuju Kalimantan, menciptakan ancaman tersendiri. Demikian halnya dengan afirmative action yang masih juga belum menjadi pembicaraan dalam perencanaan pembangunan IKN. Ancaman adanya marginalisasi yang berakibat pada konflik sosial menjadi semakin jelas tergambar.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok tidak terlepas dari interaksi dengan kelompok lain. Interaksi pada kelompok multikultural dengan perbedaan ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan rentan terhadap konflik. Di Indonesia konflik akibat perbedaan kebudayaan lebih banyak berubah menjadi konflik destruktif yang berakibat pada bentrokan antar suku, agama, ras, atau golongan. Bentrokan ini melibatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contoh: Konflik Sampit, Ambon, Poso, Kupang dan Sambas.

Konteks konflik etnis di Indonesia menurut Sukamdi berasal dari benturan budaya karena adanya perasaan etnosentrisme (Adam Burke, 2013). Perasaan ini muncul ketika seseorang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki. Etnosentrisme ini menciptakan sentimen US vs Them. US vs Them adalah suatu fenomena yang muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap identitas sosial yang melekat dan menjadi pilihan pada level individu maupun kelompok. Setiap kelompok memiliki identitas sosial sebagai konsep yang melambangkan keanggotaan dan nilai keberadaan negara. Sentimen ini memunculkan perasaan saling terancam maupun permusuhan meski tidak ada alasan objektif atau rasional untuk melakukan hal tersebut.

Perbedaan identitas Us vs them mengelompokkan individu menjadi bagian atau tergabung dari negara tertentu dan cenderung memberikan evaluasi positif terhadap negaranya (in-group favoritism). Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan individu untuk mempertahankan konsep diri dan identitasnya (Tajfel, 2004). Us vs them memberikan dampak secara emosional dan value yang bermakna bagi negara tersebut. Artinya negara diikat dalam identitas yang kolektif dan berkompetisi untuk lebih unggul dengan kelompok atau negara lain yang berbeda dari dirinya. Selain itu, pandangan us vs them ikut memberikan label yang berarti "Itu mereka, dan ini kita. Kita berbeda dengan mereka dan mereka bukan kita."

Secara struktural, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari hubungan antar etnis tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu terjadi kerjasama yang baik. Ada kalanya mereka berbenturan (konflik) karena berbagai sebab, baik

bersifat sepele maupun yang serius. Menurut Soemarjan (Nanang, 2011), di mana ada dua atau beberapa suku hidup sebagai tetangga dekat maka karena kebudayaannya yang berbeda selama hubungan antara mereka itu tidak dapat dihindarkan tumbuhnya bibit-bibit konflik sosial atau konflik budaya. Kemudian berkembang menjadi ancaman terhadap identitas dimana suku asli Kalimantan yang terusik oleh kedatangan pendatang. Ditambah lagi dengan tidak adanya akulturasi budaya diantara keduanya dimana masyarakat pendatang yang cenderung hidup bergerombol dalam kelompoknya. Konflik ini bersifat laten karena di antara kedua etnis yang bertikai (Dayak dengan Madura) sudah lama terjadi ketidakharmonisan dalam interaksi sosialnya (Hogg, Michael A. and Dominic Abrams, 1988).

Akselelatornya adalah semakin lama terjadi peningkatan populasi suku lain yang juga mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan yang menimbulkan rasa iri atau tidak suka bagi kelompok adat. Dalam kehidupan jika terdapat kondisi kelompok pendatang cenderung acuh dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar selaku penduduk asli, sedangkan suku adat sendiri sangat menghormati dan menjunjung hukum adat dan budaya lokal seperti hak atas kepemilikan tanah. Selang beberapa lama terjadi akumulasi kekecewaan karena perasaan ketidakadilan akan permasalahan ekonomi dan politik dibarengi dengan adanya perbedaan identitas yang terjadi antara etnis kelompok.

Triggernya adalah kesalahpahaman sekelompok orang di dua sisi yang kemudian meluas kepada konflik antar suku. Kecurigaan terhadap etnis lain tidak bisa dibendung ditambah dengan tidak adanya kontrol sosial negara yang

kuat untuk menekan konflik. Konflik akibat perbedaan suku bangsa selalu melibatkan penggunaan kekerasan dan dianggap tidak rasional. Hal ini jelas terlihat pada dampak yang terjadi pasca konflik horizontal Dayak dan Madura. Mereka tidak melihat dampak dari kekerasan bagi masyarakat mereka sendiri yaitu korban jiwa dan harta benda, tetapi yang terpenting adalah keluarnya orang luar dari wilayah mereka.

Selain itu, dengan pembangunan IKN, terdapat kekhawatiran akan hilangnya beberapa kebudayaan seperti Rumah Panjang yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat selama ini; kuburan-kuburan tua yang dianggap sebagai situs keramat; beberapa tempat wisata, seperti misalnya Batu Dinding, yang belum sepenuhnya dikembangkan; serta kegiatan budaya seperti lomba ketinting di sungai, lomba sulam tenun dan manik motif Dayak, dan sebagainya yang selama ini rutin diselenggarakan. Misalnya di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten KuKar, yang dulunya merupakan pusat kerajaan Hindu tertua di Indonesia, pernah dilakukan penelitian candi oleh Balai Cagar Budaya Banjarmasin. Namun kegiatan tidak berlanjut karena telah berkembang menjadi pemukiman penduduk yang padat (Wijaya, 2012).

Potensi Konflik: Eksistensi Lembaga Adat

Problematika yang ditemukan di lapangan adalah ketidakpastian posisi dari berbagai lembaga adat yang ada di Kalimantan Timur. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan akan posisi “masyarakat adat asli” di Pemerintahan Kalimantan Timur, tetapi berbagai pihak menunjuk diri mereka sebagai “masyarakat adat” dan meminta untuk

diberikan hak mereka sebagai “Putera Daerah”.

Setelah mengumpulkan data di lapangan, peneliti menemukan 3 reaksi mengenai lembaga adat. Sisi Polda mengatakan bahwa belum ada undang – undang mengenai Lembaga Adat Kalimantan Timur, sehingga hak ulayat pun sebenarnya tidak bisa di claim oleh lembaga adat tersebut. Selain itu, Polda juga mengidentifikasi lembaga adat yang ada sebagai organisasi masyarakat. Kemudian sisi Kantor Gubernur Kaltim menyatakan bahwa lembaga adat itu yang mempunyai andil dalam forum – forum adat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga perdamaian antar masyarakat. Kantor Gubernur juga menyatakan bahwa suara dari lembaga adat ini menjadi pertimbangan yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Dan terakhir sisi Lembaga Adat mengemukakan bahwa mereka merasa pemerintah masih kurang dalam mengikutsertakan mereka dalam berbagai keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Adat kemudian menjelaskan bahwa mereka merupakan medium suara masyarakat adat mereka yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

Terlebih terdapat sebagian organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan suku menimbulkan masalah, antara lain dengan berfungsi sebagai broker / middleman masyarakat di desa dan berbagai proyek pembangunan. Dalam perekrutan pekerja lokal di pertambangan misalnya, organisasi tertentu berperan sebagai broker yang menghubungkan calon pekerja dengan pihak perusahaan. Adanya dominasi etnis dan organisasi tertentu dalam hal akses sumber kehidupan di suatu wilayah sering menimbulkan disharmoni di masyarakat.

Potensi Konflik: Terpinggirnnya Masyarakat

Potensi terpinggirkan masyarakat setempat serta hilangnya identitas dan budaya local menjadi kekhawatiran yang banyak disampaikan masyarakat dan tokoh adat. Kekhawatiran ini berakar pada masalah tanah dan mata pencaharian, serta tergerusnya nilai-nilai budaya dan tradisi oleh modernisasi. Dalam buku laporan bappenas mengenai pemindahan ibukota berpandangan kehidupan masyarakat asli sangat rentan akan tekanan perubahan secara cepat yang terjadi, termasuk adanya pemindahan IKN. Apabila relokasi harus dilakukan, maka kehidupan ekonomi yang berbasis hutan dan sumber daya alam perlu dipertahankan, agar identitas dan penghidupan masyarakat dapat tetap terjaga, dan kesejahteraannya tidak jauh tertinggal dari suku lainnya.

Narasumber dari Tokoh Adat dari Lembaga Adat Paser sampai Pejabat di Kesbangpol menyatakan bahwa masyarakat Penajam Paser Utara siap menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara berikut dengan arus kedatangan SDM yang tentunya membawa budaya asli dari daerahnya masing-masing. Masyarakat Penajam Paser Utara telah biasa hidup berdampingan dengan budaya – budaya dari daerah lain bahkan seperti yang peneliti telah jelaskan sebelumnya bahwa di Penajam Paser Utara sering diadakan acara – acara kebudayaan yang merangkum berbagai budaya yang ada di Penajam Paser Utara tanpa menghilangkan budaya asli dari Penajam Paser Utara itu sendiri.

Kekhawatiran masyarakat juga dikarenakan tekanan akan adanya persaingan ketika terjadinya pemindahan ibukota dengan adanya laju migrasi. Rasa takut ini juga dirasakan masyarakat karena pendidikan di Kalimantan Timur

yang kalah bersaing jika dibandingkan kualitas pendidikan penduduk Jakarta.

Upaya Pencegahan Potensi Konflik

Saat ini, upaya pencegahan dengan langkah konkrit yang sudah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan beberapa forum masyarakat yang aktif dalam penanganan konflik sosial ini adalah: (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; (2) Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; (3) Forum Pembauran Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Tetapi untuk mencegah potensi konflik sosial yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi jembatan untuk menciptakan perdamaian, diantaranya;

Upaya pencegahan konflik perlu dibuat prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dengan tahapan – tahapan agar terjadinya adaptasi natural dalam masyarakat. Waktu dan proses yang bertahap juga akan memberikan ruang untuk masyarakat berinteraksi satu sama lain secara perlahan dan membangun pemahaman akan satu sama lain (Ranjabar, 2015). Selain itu, kebijakan affirmative menjadi kunci untuk menutupi adanya kesenjangan dan

kecemburuan sosial yang dapat timbul dan membantu masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini.

Kemudian, dibutuhkan penjelasan posisi lembaga adat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini disertai dengan pembuatan undang – undang khusus untuk menjelaskan siapa dan apa saja yang merupakan hak dari lembaga adat tersebut. Hal ini dikarenakan legitimasi putera daerah yang belum diatur dalam undang – undang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Penegakan hukum juga berlaku untuk memberantas oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan suku untuk kepentingan pribadi semata dan menyebabkan disharmoni dalam masyarakat.

Dan terakhir, pemerintah harus dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat rentan konflik. Hal ini agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan sosial-politik-ekonomi sebelum berkembang menjadi kekerasan. Sebagai contoh adalah pembekalan pengetahuan dan sensitifitas terhadap isu-isu konflik kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti akademisi, NGO, dan tokoh adat, agama, maupun masyarakat. Penyelenggarakan dialog secara rutin antara suku, agama, ras, dan golongan juga dapat membantu proses mediasi dan menjaga kerukunan dalam berwarga

KESIMPULAN

Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki potensi konflik sosial diantaranya dikarenakan exodus pemindahan, eksistensi lembaga adat dan potensi terpinggirnnya (marginalisasi) masyarakat. Potensi – potensi ini disebabkan perubahan yang

mendadak dan cepat sehingga tidak ada ruang untuk masyarakat beradaptasi dan bersosialisasi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan konflik yang dapat berpengaruh terhadap kestabilan keamanan nasional.

Upaya pencegahan potensi konflik sosial yang telah dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Timur secara konkrit diantaranya adalah pelaksanaan forum – forum kebangsaan, mediasi, upaya sinergi antar stakeholder, serta penegakan hukum yang adil.

Bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan kajian dan penelitian secara komprehensif untuk melihat potensi konflik yang muncul seiring tahapan pemindahan ibukota. Hal ini dikarenakan data lapangan yang dinamis sehingga pembaruan data dan analisis dibutuhkan agar kebijakan dan pengambilan keputusan tepat sasaran dengan memperhatikan hak – hak rakyat Kalimantan Timur.

Bagi Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat untuk dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam rangka rencana Pemindahan Ibukota Negara Indonesia, sebagai langkah affirmative masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Burke, P. T.-O. (2013). *The Contested Corners of Asia*. California: Asian Foundation.
- Alo, L. (2015). *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal*.
- Hartati, E. S. (2019). *Urgensi Pemindahan Ibukota Negara*. Jakarta: KOMPAS.

- Hogg, Michael A. and Dominic Abrams. (1988). *Hogg, Michael A. and Dominic Abrams. (1988). Social identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge.
- Nanang, M. (2011). *Sosiologi Perubahan dan Social (Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Potter, A. (2017). Locating the government: Capital cities and civil conflict. *Research and Politics*, 1-7.
- Ranjabar, J. (2015). *Perubahan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-16)*. Bandung: Alfabeta.
- Tajfel, H. &. (2004). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. Psychology Press.
- Wijaya, A. (2012). *Ensiklopedi Suku-suku Asli Di Kalimantan Timur*. Samarinda: Yayasan Bioma.
- Yuniarti. (2018). Upaya Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 165-178.